

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung dilihat dari kelima dimensi akuntabilitas, yaitu *transparency, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan informasi mengenai PPDB belum bersifat terbuka dan belum mudah dijangkau masyarakat, kemudian Dinas Pendidikan Kota Bandung juga belum dapat memberi apresiasi bagi pegawai pelaksana PPDB. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian terhadap aturan yang berlaku dalam pelaksanaan PPDB dan Dinas Pendidikan Kota Bandung belum dapat mengatasi aduan yang disampaikan masyarakat.

Berikut ini kesimpulan berdasarkan dimensi-dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppell.

1. *Transparency*

Transparency di Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam melaksanakan PPDB khususnya sistem zonasi yang diukur dengan tiga indikator masih kurang. Dari ketiga indikator, seluruhnya belum terlaksana dengan baik. Informasi mengenai PPDB yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan

Kota Bandung masih belum dapat diakses masyarakat dengan mudah dan terbuka sebab informasi yang disediakan melalui situs ppdb.bandung.go.id belum sepenuhnya transparan dan hanya memuat hasil akhir proses pengukuran jarak dan tidak memuat informasi secara keseluruhan.

2. *Liability*

Liability Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung yang diukur dari empat indikator belum cukup baik. Dari keempat indikator tersebut, hanya dua yang telah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung belum dapat memberikan apresiasi kepada pegawainya yang telah melaksanakan PPDB dengan baik.

3. *Controllability*

Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam dimensi *controllability* dapat dikatakan cukup baik dalam melaksanakan kebijakan PPDB khususnya pada jalur zonasi. Dari kedua indikator, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melaksanakan keduanya. Hal tersebut dibuktikan prosedur yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga telah dapat dikendalikan oleh masyarakat dengan adanya *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan melakukan kerja sama dengan perwakilan masyarakat ataupun orang tua peserta didik.

4. *Responsibility*

Responsibility Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dikatakan belum cukup baik dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP melalui jalur zonasi di Kota Bandung. Dari dua indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas, masih terdapat satu indikator yang belum dilaksanakan yaitu masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan PPDB di tingkat SMP di Kota Bandung yaitu terkait pengukuran yang belum berlangsung secara akurat.

5. *Responsiveness*

Dilihat dari dimensi *responsiveness*, Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dikatakan belum cukup baik. Dari dua indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas, kedua-duanya masih belum terlaksana. Dinas Pendidikan Kota Bandung belum dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat karena selama ini aduan yang diterima oleh Dinas Kota Bandung belum dapat diatasi dengan baik dan cenderung hanya ditampung tanpa dilakukan solusi.

Berdasarkan kesimpulan dari keseluruhan indikator, maka bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan, akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi Di Kota Bandung masih perlu ditingkatkan, karena keempat dimensi akuntabilitas yang diukur masih menunjukkan situasi atau kondisi yang kurang baik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat memberikan edukasi tentang bagaimana cara mengakses situs PPDB dan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya peran orang tua dalam proses pemantauan anak mereka di sekolah yang dituju.
2. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga sebaiknya menampilkan informasi yang mengenai alamat dan asal calon peserta didik dalam situs ppdb.bandung.go.id agar kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Kota Bandung dan sekolah selaku penyedia layanan tetap tinggi.
3. Dinas Pendidikan Kota Bandung perlu memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah berkinerja baik untuk menghargai upaya pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, pegawai dapat lebih termotivasi dan meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung.
4. Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan PPDB di tingkat satuan Pendidikan dengan melakukan koordinasi melalui PPID sub pembantu di tiap sekolah.
5. Daya tanggap Dinas Pendidikan Kota Bandung sebaiknya langsung memproses setiap aduan yang dilayangkan oleh masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan kinerja pengaduan di PPID sub pembantu tingkat sekolah agar proses pengaduan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Aman, A dkk, 2013, 'Enhancing Public Organizations Accountability Through E-Government Systems'. *International Journal of Conceptions on Management and Social Sciences*, Vol. 1, (2013) hal, 17-18.
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Presada Media Group, 2007.
- Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publikation, 2014.
- Djlalil, R. *Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*
- Dunn, William. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2000.
- Ghambir, B. *Capacity Building at the Local Level for Effective Governance, Empowerment without Capacity is Meaningless*. 1996.
- Johnston, M. *Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability*, New York: Colgate University, 2016.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 1989.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Raba, M. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press, 2006.
- Sawir, M. 'Konsep Akuntabilitas Publik' *Jurnal Universitas Yapis Papua*.
- Sedarmayanti, *Good Governance and Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Silalahmi, U. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: UNPAR PRESS, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta,

2007. (2017): 11. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014.

Tomuka, S. 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung'. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, (2013), Hlm. 5.

Yin, R. K. *Case Study Research Design and Methods*, California: Sage Publikation, 2003.

Wicaksono, K. W. 'Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik' *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 19 No 1.

Dokumen Resmi

6. Buku Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung 2019
7. Data Rinci PPDB 2019 Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 013 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Artikel Surat Kabar

- 'Ombudsman Terima 24 Laporan Pengaduan PPDB di Kota Bandung.' *Republika*.
Diakses dari
<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/19/06/17/pt8ns1335-ombudsman-terima-24-laporan-pengaduan-ppdb-di-kota-bandung>

- ‘Mendikbud Menjawab Kontroversi Sistem Zonasi.’ *Detik News*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4594364/mendikbud-menjawab-kontroversi-sistem-zonasi>.
- ‘Temuan Alamat Janggal di PPDB 2019.’ *Pikiran Rakyat*. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2019/06/21/temuan-alamat-janggal-di-ppdb-2019-ini-penjelasan-penghuni>.
- ‘Protes PPDB, Puluhan Orang Tua Siswa Tabur Bunga di Balkot Bandung.’ *Detik News*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4609595/protes-ppdb-puluhan-orang-tua-siswa-tabur-bunga-di-balkot-bandung>.